



## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Kajian Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Boalemo
2. Nama Unit Kerja Pelaksana : Pusat Kajian Pertanian Tropis (PKPT) Universitas Negeri Gorontalo
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
4. Diusulkan melalui DIPA : Bappeda Kabupaten Boalemo Tahun 2012
5. Jenis Kegiatan Kajian : *Deskwork*, lapangan
6. Penanggungjawab Kajian/Ketua Tim
  - a. Nama : Nurdin, SP, MSi
  - b. Pangkat/Golongan : Penata /IIIc
  - c. Jabatan : Lektor
7. Personalia
  - a. Peneliti : 3 orang staf peneliti
  - b. Teknisi : 2 orang teknisi
8. Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan (Juli – Oktober 2012)
9. Instansi Pelaksana : Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boalemo
10. Sumber Biaya : APBD Kabupaten Boalemo TA. 2012

Tilamuta, Oktober 2012

Ketua Tim Pengkaji,

Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo,



Ir. Rusdin Aminu, MM  
NIP. 196406061993031012

Handwritten signature of Nurdin, SP, MSi in blue ink.

Nurdin, SP, MSi  
NIP. 19800419 200501103

Mengetahui,

Kepala Pusat Kajian Pertanian Tropis  
(PKPT) Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, MP  
NIP. 196912091993032001



Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Hj. Fitryane Lihawa, MSi  
NIP. 196912091993032001

### SUSUNAN TIM PENKAKAJI

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo  
Penanggung Jawab Kajian : Kepala Pusat Kajian Pertanian Tropis  
Universitas Negeri Gorontalo

#### Tim Pengkaji

Ketua : Nurdin, SP, MSi  
Anggota : Wawan K. Tolinggi, SP, MSi  
Supriyo Imran, SP, MSi  
  
Tenaga Administrasi : Linda Mohamad, SE  
Operator Komputer : Rival Rahman

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOALEMO .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Rumusan Masalah .....	I-3
1.3 Pengertian Dasar .....	I-3
1.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	I-4
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan .....	I-5
1.6 Output/Luaran .....	I-5
1.7 Sistematika Laporan .....	I-6
BAB II. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NASIONAL .....	II-1
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN .....	III-1
3.1 Aspek Geografis dan Administratif .....	III-1
3.2 Aspek Perhubungan ke Lokasi Kajian .....	III-3
3.3 Keadaan Demografi dan Ketenagakerjaan .....	III-4
3.4 Penggunaan lahan .....	III-7
3.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	III-9
3.6 Kesejahteraan Sosial .....	III-14
3.7 Aspek Pelayanan Umum .....	III-17
3.8 Aspek Pertanian dan Pertambangan .....	III-23
BAB IV. METODOLOGI .....	IV-1
4.1 Waktu dan Tempat .....	IV-1
4.2 Jenis dan Sumber Data .....	IV-1
4.3 Metode Kajian .....	IV-1
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	V-1
5.1 Identifikasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Boalemo .....	V-1
5.2 Identifikasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan dalam Menerapkan Prinsip Pemberdayaan .....	V-6
5.3 Penilaian Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat .....	V-9
5.4 Identifikasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Boalemo .....	V-14
5.5 Pengaruh Program terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boalemo .....	V-20
5.6 Logical Framework Approach .....	V-22
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	VI-1
6.1 Kesimpulan .....	VI-1
6.2 Rekomendasi .....	VI-
DAFTAR PUSTAKA .....	DP-1
LAMPIRAN .....	L-1

## BAB VI

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

- a. Program-program Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 yaitu sebanyak 54 program yang terdiri dari 38,89 persen jumlah program PM yang bersumber dari APBN, 3,70 persen jumlah program PM yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan 57,41 persen jumlah program PM yang bersumber dari APBD Kabupaten Boalemo.
- b. Kewenangan pengelolaan program PM di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh SKPD yang berbeda-beda untuk setiap program. Program PM pada tahun 2012 dengan sumber dana *APBN* dikelola oleh enam SKPD yaitu Bappeda, Kantor Kopperindag, DKP, Dishubparkominfo, Kansos PM, serta Badan BP4K. Sedangkan yang bersumber dari dana *APBD Provinsi Gorontalo* hanya dikelola oleh dua SKPD yaitu Kantor Kopperindag dan KKBPP. Serta yang bersumber dari dana *APBD Kabupaten Boalemo* dominan dikelola oleh empat SKPD yaitu Kantor Kopperindag, DKP, Kansos PM.
- c. Hasil identifikasi yang dilakukan pada pelaksana (pendamping) program dan peserta program, maka program PM di Kabupaten Boalemo belum menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip pemberdayaan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena pelaksana (pendamping) program PM kurang optimal dan belum profesional dalam melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan program yaitu berupa dialog, penemuan dan pengembangan.
- d. Program PM cukup memberikan dampak yang signifikan (stimulan jangka pendek) terhadap kesejahteraan/pendapatan rumah tangga masyarakat di Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bertambahnya pendapatan rumah tangga dari sumber-sumber pendapatan lain (perkebunan, dagang, tukang bangunan, pertambangan, buruh bangunan dan lain-lain). Pemberian bantuan dari berbagai program PM dapat menstimulus masyarakat untuk melakukan usaha selain dari pekerjaan pokoknya. Manfaat lain dari program PM ini adalah dapat menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

### 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka direkomendasikan :

- a. Penajaman sasaran program PM artinya bahwa bantuan dana, sarana dan prasarana benar-benar mencapai kelompok sasaran yang paling memerlukan, sehingga meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

- b. Kelancaran dan kecepatan dalam penyaluran dana program PM serta pembangunan sarana prasarana sehingga dapat segera digunakan sepenuhnya oleh kelompok masyarakat, tepat jumlah dan waktu sesuai dengan jangka waktu yang disediakan.
- c. Membangun kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendayagunakan dana, sarana dan prasarana.
- d. Masyarakat harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan usahanya sendiri dan diberi bimbingan dan pelatihan *hard skill* dan *soft skill* berupa pendampingan supaya berhasil.
- e. Kemampuan masyarakat sebagai penerima program PM bersama pelaksana program (SKPD) untuk meningkatkan nilai tambah dari investasi tersebut dan menciptakan akumulasi modal.
- f. Melakukan analisis dan pencatatan sebagai dasar pengendalian, serta penyusunan informasi dasar yang lengkap, operasional dan bermanfaat bagi evaluasi dan penyempurnaan program PM dimasa yang akan datang.
- g. Memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada pelaksana program PM dalam hal ini SKPD terkait, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Agar pelaksana program PM lebih optimal dan profesional dalam melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan program yaitu berupa dialog, penemuan dan pengembangan.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi (*money*) kepada seluruh SKPD sebagai pelaksana program PM, khususnya kepada SKPD yang memiliki dampak *performance index* terbesar pada program PM di Kabupaten Boalemo.
- i. Memberikan *rewards* kepada SKPD dan kelompok masyarakat yang telah berhasil dalam melaksanakan program PM di Kabupaten Boalemo.
- j. Redisain program-program PM yang bertentangan dengan konsep dasar pemberdayaan, karena program-program tersebut hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat dalam jangka pendek (*short run*), namun tidak dapat menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) di Kabupaten Boalemo.